

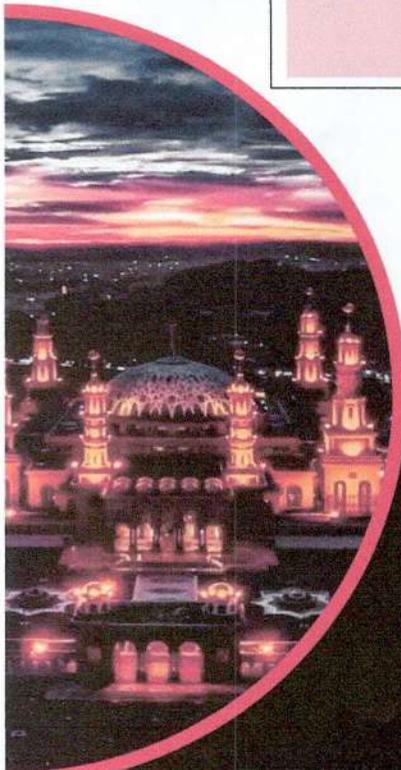


Laporan Kinerja

**BAPPERIDA**

Kota Samarinda

Tahun 2024



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai perwujudan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2021–2026, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**.

Yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul danberbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya Bapperida Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Samarinda, 20 Januari 2025

Kepala BAPPERIDA,

**H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681209 198803 1 004

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Hj. Susy Sukmawati, ST, MT	Sekretaris	
2	Zulkifli,S.Kom	Perencana Ahli Muda	
3			

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai perwujudan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2021–2026, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**. Yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu

yang diberikan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya Bapperida Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Samarinda, 20 Januari 2025

Kepala BAPPERIDA,

**H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si**

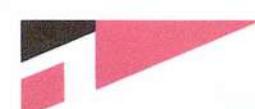
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681209 198803 1 004

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban BAPPERIDA Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Secara umum BAPPERIDA Kota Samarinda telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2024. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2024 antara lain : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan, Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk



meningkatkan birokrasi pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Inovasi dan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida indikator kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD).

Dengan adanya 3 (Tiga) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 rata-rata sebesar 97,21 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang melebihi capai target sebesar 104,39 %, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran lainnya capaian targetnya sangat Baik.

Sedangkan Total pagu anggaran DPA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar Rp. 40.901.085.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.954.751.643,- atau sebesar 92,80 % dari total pagu anggaran DPA Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1. TUGAS DAN FUNGSI.....	11
2. SUSUNAN ORGANISASI .....	13
3. SISTEMATIKA .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
1. Visi dan Misi.....	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
a. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
b. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	39
c. Analisis Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	40
BAB IV PENUTUP .....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Upaya Perbaikan Kedepan.....	111

## DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026.....	24
TABEL 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BAPPERIDA Kota Samarinda.....	25
TABEL 3. 1 Hasil Penilaian SAKIP Bappedalitbang tahun 2022 dan 2023.....	27
TABEL 3. 2 Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023 dan Tindak Lanjutnya.....	37
TABEL 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samrinda Tahun 2024.....	40
TABEL 3. 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	41
TABEL 3. 5 Sasaran Strategis, Indikator, Target, realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran.....	43
TABEL 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Penilaian dan tahun sebelumnya.....	43
TABEL 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	44
TABEL 3. 8 Identifikasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	49
TABEL 3. 9 Gambaran Singkat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rancana Aksi Pendukung Sasaran Strategis 1 (2024).....	50
TABEL 3.10 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2...65	
TABEL 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Penilaian Denga Tahun Sebelumnya (Strategis 2)...66	
TABEL 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ( Strategi 2).....	66
TABEL 3.13 Identifikasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran (Strategis 2).....	69
TABEL 3.14 Gambaran Singkat Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan dn Rencana Aksi Pendukung Sasaran Strategis 2 ( 2024).....	70
TABEL 3.15 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran.....	82
TABEL 3.16 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3).....	82
TABEL 3.17 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Strategis 3)....	83
TABEL 3.18 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (stategis 3).....	87
TABEL 3.19 Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 3.....	93
TABEL 3.20 Realisasi Anggaran Belanja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	94
TABEL 3.21 Perbandingan Pagu dan realisasi Anggaran Bapperida Kota Samarinda Tahun 2022-2024 .....	110



---

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Struktur Organisasi Bapperida Kota Samarinda.....	17
----------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda.
2. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya.

## A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### B. Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta Riset dan Inovasi. Pada tahun 2024, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat dirumuskan dalam gambar dibawah berikut ini :

No.	RUMUSAN MASALAH	ISU STRATEGIS
1.	Belum optimalnya pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, serta sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya</li> </ol>
2.	Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan	Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan
3	Sumber daya manusia dan Standar Pelayanan belum optimal	Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

### C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, sebagai

berikut:

Susunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 101 (Seratus Satu ) orang, terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural : 8 Orang
- b. Jabatan Fungsional Penyetaraan : 15 Orang
- c. Jabatan Fungsional : 7 Orang
- d. Staf / PNS : 36 Orang
- e. Honorer PTTB : 22 Orang
- f. Honorer PTTH : 13 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan:
  - a. S.3 : PNS 1 orang
  - b. S.2 : PNS 17 orang, PTTB 1 Orang
  - c. S.1 : PNS 33 orang, PTTB 16 orang, PTTH 4 Orang

- d. Diploma : 1 Orang
  - e. S L T A : PNS 13 orang, PTTB 4 orang, PTTH 9 Orang
  - f. SLTP : 1 Orang
2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 66 orang, pegawai honorer PTTB sebanyak 22 orang, PTTH 13 orang.
  3. Golongan Umur : PNS pada kelompok umur 30 - 39 sebanyak 5 orang, umur 40 - 49 sebanyak 34 orang, umur 50 – 59 sebanyak 26 orang. Honorer pada kelompok umur 20 - 29 tahun sebanyak 5 orang, umur 30 – 39 tahun sebanyak 22 orang, umur 40 – 49 tahun sebanyak 5 orang dan umur 50 – 59 tahun sebanyak 3 orang
  4. Pangkat/Golongan PNS yaitu golongan II/c 3 orang, golongan II/d 4 orang, golongan III/a 7 orang, golongan III/b 9 orang pada golongan III/c 8 orang, golongan III/d 22 orang, golongan IV/a 10 orang, golongan IV/b 1 orang dan 2 orang pada golongan IV/c.
  5. Masa Kerja Pegawai : sebanyak 2 orang memiliki masa kerja antara 0–5 tahun; sebanyak 2 orang memiliki masa kerja antara 6–10 tahun; sebanyak 8 orang memiliki masa kerja antara 11- 15 tahun; sebanyak 19 orang memiliki masa kerja antara 16–20 tahun; sebanyak 25 orang memiliki masa kerja antara 21 – 25 tahun; sebanyak 8 orang memiliki masa kerja antara 26 - 30 Tahun; sebanyak 4 Orang memiliki masa kerja 31 – 35 tahun.
  6. Masa Kerja Pegawai Honorer : sebanyak 2 orang memiliki masa kerja 0 -5 tahun; sebanyak 9 orang memiliki masa kerja 5 – 10 tahun; sebanyak 24 orang memiliki masa kerja 10 – 15 tahun

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dasar/master program pembangunan Kota Samarinda dalam bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Penelitian dan Pengembangan. Semua perencanaan tentunya disesuaikan dengan arah pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam visi dan misi Kota Samarinda.

Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan informasi program-program pembangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun, sehingga BAPPERIDA tidak akan kehilangan informasi terhadap program-program mana yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan ataupun aspek-aspek mana yang belum tersentuh dalam perencanaan.

- 2) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, Perencanaan perekonomian, SDA infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan. Strategi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pengendalian terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sehingga pembangunan di Kota Samarinda tidak akan kehilangan arah.
- 3) Meningkatkan kemampuan internal BAPPERIDA Kota Samarinda, dengan jalan bekerjasama dengan pihak profesional dalam melakukan penelitian terhadap suatu program/kegiatan pembangunan apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan, sehingga hal ini akan dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang berakibat pada inefisiensi dan inefektifitas terhadap anggaran pembangunan yang ada.
- 4) Meningkatkan kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait dalam kegiatan perencanaan pembangunan,
- 5) Perencanaan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan penelitian dan pengembangan Meskipun langkah koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah BAPPERIDA Kota Samarinda selama ini sudah terprogram dengan baik, akan tetapi isi, partisipasi dan perhatian aspirasi dalam forum koordinasi tersebut haruslah lebih ditingkatkan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana. Hal ini dimaksudkan adalah tugas BAPPERIDA tidak hanya merencanakan pembangunan, akan tetapi juga tetap melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dan jajarannya letak kelebihan dan kekurangan proses

pembangunan daerah di Kota Samarinda serta mampu memberikan solusi terhadap masalah pembangunan daerah.

7) Secara rinci struktur organisasi BAPPERIDA Kota Samarinda terdapat pada gambar 1:

**GAMBAR 1**

**Struktur Organisasi BAPPERIDA Kota Samarinda**



## D. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelesan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



## B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

## BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

### **1. Visi dan Misi**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (*stakeholder*), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Kota Samarinda di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026,

## “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

yaitu:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur BAPPERIDA Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi

Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas ke pemerintahannya. Misi Kota Samarinda di dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun tujuan Renstra Perubahan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel”. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat,

provinsi dan kota, dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan. Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Berdasarkan tujuan BAPPERIDA Kota Samarinda, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut:
  - Nilai SAKIP kota komponen perencanaan kinerja
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik, dengan indikator sebagai berikut:
  - Indeks Inovasi Daerah

Tujuan kedua "Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat". Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat berubah seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal, Untuk

mengetahui lebih jauh, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik: Faktor Struktur Organisasi, Faktor Aparatur Sipil Negara/pelayan Publik, Faktor Sistem Pelayanan Publik. Dalam tujuan kedua ini sasaran dan indikator yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA dengan indikator sebagai berikut: Indeks Pelayanan Publik

Dari rumusan tujuan dan indikatornya maka strategi untuk pencapaian sasaran di BAPPERIDA Kota Samarinda sebagai berikut :

- Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah
- Strategi 2 : Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya
- Strategi 3 : Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan
- Strategi 4 : Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Berikut kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan strategi adalah :

- Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah, dengan kebijakan :
- Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
  - Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
  - Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
  - Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renstra/ Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RPJMD/RKPD

Strategi 2 : Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen

perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya, dengan kebijakan :

- Peningkatan hasil evaluasi RKPD
- Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD

Strategi 3 : Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan selanjutnya, dengan kebijakan : Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur kelitbangan

Strategi 4 : Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dengan kebijakan: Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja BAPPERIDA

**TABEL 2.1**

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR**

**KINERJA TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	20,48	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokras pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	50	53	63	64	67	71
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM	78	82	85	86	87	90

### 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 di Tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BAPPERIDA KOTA SAMARINDA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,50
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	64
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM	86

**TABEL 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BAPPERIDA KOTA SAMARINDA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.444.327.804	APBD 2024
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12.739.202.500	APBD 2024
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.059.666.00	APBD 2024
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.657.888.700	APBD 2024

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Bapperida Tahun 2024

1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2022 & 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	2022			2023		
		INSTANSI			INSTANSI		
		BOBOT	Jawaban 0 s.d 100 (ikuti petunjuk)	NILAI	BOBOT	Jawaban 0 s.d 100 (ikuti petunjuk)	NILAI
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30	92,83	27,85	30		27
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedla</b>	6	97,50	5,85	6		5,5
<b>Kriteria:</b>							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan setiap satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja (Perjanjian kinerja)	1	1		1		1
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	1	1		1		1
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	1	1		2		2
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	2	2		1		1
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	1	0,85		1		0,5
	rumus penilaian (realisasi/jumlah indikator)*100	6	97,50				

1. b	<b>Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logika, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	9	100,00	9,00	9	7,5
<b>Kriteria:</b>						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	0,25	0,25		1	0,5
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	0,25	0,25		1	1
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	0,5	0,5		1	1
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	1	1		1	1
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	1	1		1	0
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	1	1		1	1
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	1	1		1	1
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	1	1		1	1

9	Perencanaan kinerja+++ dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	1	1		1		1
10	Setiap Sub unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	1	1				
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	1	1				
		9	100,00				
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15</b>	<b>86,67</b>	<b>13</b>	<b>15</b>		<b>14</b>
<b>Kriteria:</b>							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	1	1		2		2
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	1	1		2		2
3	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	2	2				
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	4	2		2		2
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	2	2				
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	1	1		3		2
7	Setiap sub unit memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai	3	3		3		3

	kinerja yang telah direncanakan						
8	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1	1		3		3
		15	86,67	86,67			
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30</b>	<b>73,33</b>	<b>22</b>	<b>30</b>		<b>21</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
<b>Kriteria:</b>							
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	2	2		2		2
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	2	2		2		2
3	Terdapat mekanismae yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	2	2		2		0
		6	100				
<b>2. b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9</b>	<b>69,44</b>	<b>6,25</b>	<b>9</b>		<b>8</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Pimpinan selalu terliobat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	1	0,5		2		2
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1	0,75		2		1
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	2	1				
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	2	1		2		2

5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	1	1		1		1
6	Pengumpulan data kinerja ialah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1	1		2		2
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi).	1	1				
		9	69,44				
<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi datam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>9,75</b>	<b>15</b>		<b>9</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	1	0,75		2		2
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	1	0,25				
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	1	1				
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	2	2		2		1
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi panyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	2	2		2		1
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	2	0,5		2		1

7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	2	2		2		1
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	2	0,5		2		0
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1	0,25		2		2
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1	0,5		1		1
		15	65				
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15</b>	<b>73,33</b>	<b>11</b>	<b>15</b>		<b>9,75</b>
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2,5</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	0,5	0,5		1		1
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	1	1		0,5		0
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	0,5	0,5		0,5		0,5
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	0,5	0,5		0,5		0,5
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	0,5	0,5		0,5		0,5
		3	100				
<b>3. b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/ penyempurnaannya</b>	<b>4,50</b>	<b>77,78</b>	<b>3,50</b>	<b>4,5</b>		<b>2,25</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	0,5	0,5		0,5		0,25

2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0,5	0,5		0,5		0,5
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan anaiisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.	0,5	0,5		0,5		0,5
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA				0,5		0
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	0,5	0,5				
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	0,5	0,5		0,5		0
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/internasional (benchmark Kinerja)	0,5	0				
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	0,5	0		0,5		0,5
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efrsienasi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	0,5	0,5		0,5		0
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	0,5	0,5		0,5		0,5
		4,5	77,78				

3.c	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebljakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>60</b>	<b>4,50</b>	<b>7,5</b>		<b>5</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	1	1		1,5		1,5
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	1	0,5		1		0,25
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	1	0,5		1		0,5
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1	0,5		1		0,5
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	1	1		1		1
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1	0,25		1		1
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1,5	0,75		1		0,25
		7,5	60				
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>17,50</b>	<b>25</b>		<b>15,5</b>

	<b>INTERNAL</b>						
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>3,50</b>	<b>5</b>		<b>4</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Terdapat pedoman teJmis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1	1		2		2
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	2	1		3		2
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	2	1,5				
		5	70				
<b>4. b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7,50</b>	<b>73,33</b>	<b>5,50</b>	<b>7,5</b>		<b>6,5</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	1	1		2		2
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	1	0,5		2		1
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	2	1,5		2		2
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh sub unit kerja/perangkat daerah.	2,5	1,5				
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan	1	1		1,5		1,5

	Teknologi Informasi (Aplikasi).						
		7,5	73,33				
<b>4.c</b>	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	<b>12,50</b>	<b>68</b>	<b>8,50</b>	<b>12,5</b>		<b>5</b>
<b>Kriteria :</b>							
1	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	2,5	1,5		4		2
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	2,5	1,75		4		2
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	2,5	1,75				
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	2,5	1,75				
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	2,5	1,75		4,5		1
		12,5	68				
	<b>TOTAL NILAI (PREDIKAT)</b>	<b>100</b>	<b>78,35</b>	<b>78,35</b>	<b>100</b>		<b>73,25</b>

Terdapat penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bapperida tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 3.1 menunjukkan

bahwa terjadi penurunan nilai SAKIP dari 78,35 menjadi 73,25. Meskipun demikian kategori penilaian BB.

2) Tindak lanjut atas Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023 dari Inspektorat Kota Samarinda.

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Bapperida Kota sebagai Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2023. Tabel 3.2 menjabarkan Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023 tersebut serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BAPPERIDA Kota Samarinda .

Tabel 3.2 Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023 dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Membuat Dokumen Perencanaan Anggaran RUP	Sudah Dilaksanakan	Dokumen tersedia
2	Dokumen perencanaan Renstra, Renja, Rencana Aksi, IKU, PK, DPA, RKA, KAK, RUP harus diformalkan	Sudah Dilaksanakan	Dokumen tersedia
3	Membuat Kertas Kerja pada Indikator SMART beserta formilasi dan sumber datanya	Sudah Dilaksanakan	Terdapat di Dokumen IKU Pada Lampiran
4	Membuat SOP pengumpulan data kinerja	Sudah Dilaksanakan	Dokumen SOP tersedia
5	Dokumen Laporan Kinerja menginfokan dan menjelaskan efisiensi atas penggunaan anggaran baik fisik dan keuangan yang dilakukan dalam mencapai dalam mencapai kinerja	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III

6	Membuat Laporan Kinerja Per triwulan yang disusun secara berkala berdasarkan monev	Sudah dibuatkan Lapornya	Laporan Tersedia
7	Dokumen laporan kinerja agar disusun sesuai standar format lampiran II berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014	Pembuatan Lakip Tahun 2024 berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014	Bab I Sesuai Sistematika
8	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan target renstra dibandingkan dengan realisasi capai kinerja pada tahun evaluasi	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
9	Dokumen laporan kinerja menginfokan dan menjelaskan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
10	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel provinsi/nasional	Tidak	Tidak
11	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan tentang efisiensi atas penggunaan sumberdaya (SDM, Anggaran, sarana dan prasarana)	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
12	Dokumen Laporan Kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai dan mendokumentasikan bukti realisasi notulen yang berisikan pembahasan pencapaian kinerja undangan, daftar hadir dan dokumentasi yang dihadiri seluruh pegawai	Sudah Dilaksanakan	Laporan Tersedia
13	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan Renja Murni, Rankir, Perubahan dan monev	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III

14	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan penyesuaian penggunaan anggaran dan kegiatan untuk mencapai kinerja berdasarkan DPA murni dan DPA perubahan	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
15	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan dan menjelaskan perubahan budaya kinerja mulai pencapaian target , adanya efesiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran/hukuman disiplin dan ada inovasi	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
16	Evaluator ST yang ditunjuk agar memiliki sertifikat atau undangan mengikuti sosialisasi/diklat/bimtek/workshop AKIP	Mengirim ASN dan Non ASN Mengikuti Bimtek	Sertifikat
17	Membuat rencana Aksi tindak lanjut dari hasil evaluasi akuntabilitas yang belum ditindaklanjuti	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
18	Terjadinya peningkatan pada hasil laporan evaluasi SAKIP dengan peningkatan nilai sakip	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III
19	Terjadinya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sudah disesuaikan dengan Lakip Tahun 2024	Bab III

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024

Pada tahun 2024 sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda, sasaran strategis ada 3 sedangkan indikator kinerja ada 3, Tingkat capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024, diperoleh hasil dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**  
**BAPPERIDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,50	21,33	Nilai	99,20
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	64	57,12	Nilai	89,25
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM	86	89,78	Nilai	104,39
RATA-RATA						<b>97,61</b>

### C. Analisis Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024

Bapperida Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyusunan analisis capaian kinerja organisasi (Bapperida Kota Samarinda) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dinilai;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dinilai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yakni:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA NILAI REALISASI KINERJA</b>
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

## **I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran ini menggambarkan kinerja organisasi dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian target dari program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu diupayakan untuk berjalan secara optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Alat ukur kinerja sasaran pertama adalah Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja tahun 2024 yang mencapai target yang telah ditetapkan. Program prioritas dikategorikan sebagai program yang "Tercapai" realisasi kinerjanya jika memiliki capaian di atas 99%. Nilai ini mengadopsi skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI tersebut membagi peringkat kinerja menjadi lima kelas, di mana nilai capaian di atas 90% dikategorikan sebagai realisasi kinerja sangat tinggi.

Tabel beserta uraian selanjutnya akan memberikan gambaran mengenai Sasaran Strategis, Indikator yang digunakan, target, serta realisasi dari kinerja strategis (sasaran) pertama.

## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.5 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,50	21,33	Nilai	99,20

Kinerja strategis 1 Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 mencapai 99,20%. Walaupun masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan. Pembahasan/analisis secara komprehensif mengenai realisasi dan capaian kinerja strategis 1 akan dilakukan bersamaan setelah proses analisis terhadap capaian tahun sebelumnya serta analisis lainnya dilakukan.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,00	21,15	21,20	21,28	21,50	21,33

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 masih di bawah target yang ditetapkan atau capaian kinerja tidak mencapai 100% melainkan sebesar 99,20%. Nilai capaian dapat dikatakan "Sangat Tinggi" walaupun belum mencapai target yang ditetapkan (100%). Observasi periodik melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya (2023) juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2023, Nilai Sakip Kota Komponen Perencanaan Kinerja yang mencapai target adalah 100,37%.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bapperida 2021 – 2026)

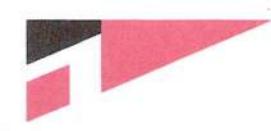
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,50	21,33	Capaian sebesar 99,20 %

Pada tahun 2024 perencanaan jangka menengah 2021–2026, sasaran strategis pertama memiliki capaian sebesar 99,20% walaupun belum mencapai target 100% namun dapat dikategorikan sebagai pencapaian "Sangat Tinggi".

### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Tercapai atau tidaknya target kinerja program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang dapat dikendalikan maupun hal di luar kendali Bapperida & Perangkat Daerah. Indikator program memiliki karakter manfaat,



yakni kondisi positif apa yang dapat dirasakan/dinikmati sekalipun. Karena sifat dari pencapaian program adalah manfaat secara luas, pada berbagai kondisi target program dapat dicapai jika terdapat kinerja pihak/stakeholder lainnya, misal: Pemerintah Pusat, sektor swasta, kelompok masyarakat, dsb.

Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan organisasi dalam mengupayakan tercapainya target kinerja program. Beberapa diantaranya adalah:

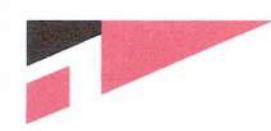
- 1) Kemampuan untuk menentukan target kinerja berdasarkan data & analisis yang akurat dan mutakhir. Dengan memahami bagaimana sebuah program berjalan serta bagaimana sebuah program dapat mencapai target manfaat yang diharapkan, perencana dapat menentukan target yang mungkin dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia, baik waktu, biaya/anggaran, serta sumber daya lainnya
- 2) Koordinasi yang efektif serta keselarasan substansi antara proses perencanaan dan penganggaran. Target yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan hendaknya didukung dengan alokasi anggaran. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara cermat dan teliti agar penggunaannya tepat sasaran
- 3) Proses pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara konsisten. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja sebuah program. Pemantauan/evaluasi hendaknya dilaksanakan secara berkala



agar jika terdapat kendala, dapat segera diselesaikan dan apabila kinerja program berbeda dari yang direncanakan, langkah antisipatif dapat dilakukan.

- 4) Kemampuan perencana dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Target kinerja Pemerintah Daerah hendaknya didukung oleh aksi yang diturunkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perencana (personil Bapperida Kota Samarinda) perlu memastikan bahwa target strategis pemerintah daerah hingga visi misi daerah didukung oleh kinerja strategis perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)

Sementara itu, faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja Bapperida untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat terlaksana, tepat sasaran, dan mencapai target yang ditetapkan, adalah negasi atau kebalikan dari faktor faktor yang disebutkan di atas. Tidak optimalnya analisis untuk memprediksi target, kurangnya akurasi dalam menentukan indikator dan target kinerja, koordinasi yang belum optimal dan efektif, tidak terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta belum optimalnya fungsi Bapperida dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, menjadi faktor yang dapat menurunkan kinerja organisasi. Di samping kondisi-kondisi tersebut, penurunan kinerja Bapperida Kota Samarinda dapat dipengaruhi oleh Jumlah



indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali Bapperida dan Perangkat Daerah. Semakin banyak indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan di luar kendali aparatur, maka nilai kinerja organisasi semakin rentan mengalami fluktuasi dan dapat dikatakan sulit untuk memastikan bahwa dengan aksi atau upaya tertentu, suatu target dapat dicapai. Contoh dari faktor tersebut misalnya kinerja organisasi lainnya (Pemerintah Pusat, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, stakeholder pembangunan lainnya), kebijakan oleh Pemerintah Pusat, kondisi alam, dan sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapperida Kota Samarinda. Kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan olah pikir Sumber Daya Manusia di Bapperida Kota Samarinda. Peningkatan kapasitas dapat membantu perencana untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan analisis data, interpretasi data dan fenomena pembangunan dan mengaitkannya dengan hal yang berpengaruh pada pembangunan daerah, termasuk kinerja perencanaan di perangkat daerah.
2. Mengupayakan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Memastikan proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan dengan tepat mutu terutama keselarasannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan proses ini dapat



diimplementasikan serta terukur, Bapperida telah memasukkan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salahsatu aspek penting yang menunjukkan kualitas perencanaan. Aspek keselarasan ini menjadi salah satu komponen dalam indikator "Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja.

4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara konsisten tiap Triwulan. Tahapan ini juga telah didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, yakni melalui aplikasi DALEV

#### **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal. Tabel 3.8 menggambarkan faktor yang akan dikalkulasi untuk memperoleh gambaran efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.8 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efesiensi (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	95,05	88,09	11,91

Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis kesatu. Kinerja anggaran adalah sebesar 88,09% dengan capaian kinerja 95,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, upaya untuk mencapai kualitas perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 11,91%.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya pencapaian target sasaran "Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja" didukung oleh pelaksanaan "Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 12.739.202.500,- dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 6.059.666.000,-. Secara lebih mendetail, kinerja program tersebut serta uraian aksi disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 1 (2024)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	AKSI
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase capaian kinerja seluruh perangkat daerah	%	88	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	4	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	Membentuk Tim Penyusun RKPD
				Orientasi mengenai RKPD
				Menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD
				Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD untuk Rancangan Awal RKPD
				Melakukan Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD
				Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD untuk Rancangan Perubahan RKPD
				Analisa Kondisi Wilayah
				Pembahasan penyempurnaan Analisa Kondisi Wilayah
				Penyempurnaan Analisa Kondisi Wilayah
				Penetapan Analisa Kondisi Wilayah
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	2	Melaksanakan rapat mengenai sinkronisasi dokumen perencanaan Kota dengan Provinsi dan Pusat
				Menuangkan hasil sinkronisasi dokumen perencanaan dalam Rancangan Awal RKPD

Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Daerah Daerah			Melaksanakan sinkronisasi dokumen Rencana Aksi Daerah
				Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi mengenai dokumen perubahan RKPD dengan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	Persiapan pelaksanaan Konsultasi Publik
				Melaksanakan Konsultasi Publik RKPD
				Melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD
				Penyampaian Rancangan Awal RKPD ke Walikota
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	Persiapan pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Melaksanakan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Melakukan pendampingan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal Renja
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	Menyusun Dokumen Rancangan Perencanaan
				Menyampaikan rancangan RKPD ke Walikota
				Membuat konsep Surat Edaran Walikota mengenai Rancangan RKPD
				Melaksanakan Musrenbang Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2000	Melakukan koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
				Menghadiri dan melakukan pendampingan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

				Melakukan pendampingan terhadap Kecamatan mengenai penginputan usulan Musrenbang Kecamatan dalam SIPD
				Melakukan analisis terhadap usulan Musrenbang Kecamatan dalam SIPD
				Melakukan verifikasi Usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPd)	Dokumen	2	Melakukan pendampingan Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah
				Melakukan Verifikasi Rancangan Renja
				Melakukan penajaman Rancangan Renja bersama dengan Perangkat Daerah
				Menyusun Dokumen Rancangan Akhir Perencanaan
				Melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
				Melakukan penyampaian Rancangan Akhir RKPd ke Sekda
				Menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota ke Walikota
				Menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota mengenai RKPd kepada Gubernur untuk di fasilitasi
				Melakukan perbaikan terhadap hasil fasilitasi Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Walikota
				Memfasilitasi Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPd
				Memfasilitasi Penetapan Peraturan Walikota tentang Renja PD

				<p>Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD</p> <p>Melakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD</p> <p>Melakukan Penyusunan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD</p> <p>Menyampaikan Rancangan Perkadakepada gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi untuk dilakukan fasilitas</p> <p>Memfasiltasi Penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD</p> <p>Memfasiltasi Penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan Renja PD</p>
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	<p>melakukan penghimpunan data untuk analisa dalam penyusunan dokumen Perencanaan (RKPD,RPJPD DAN RPJMD)</p> <p>Rapat Kebutuhan data untuk analisa dalam penyusunan dokumen Perencanaan</p> <p>Menyusun Instrumen untuk verifikasi Data Perangkat Daerah</p> <p>Rapat kesepakatan pemetaan data Perangkat Daerah</p> <p>Mengumpulkan data dan menganalisis data tahun 2023</p> <p>Rapat evaluasi data Perangkat Daerah tahun Triwulan IV 2023</p> <p>melakukan pengecekan pengisian data perangkat daerah</p>

				Rapat evaluasi data Perangkat Daerah Triwulan I
				Mengumpulkan data dan menganalisis data untuk penyusunan dokumen perencanaan (RKPD,RPJPD DAN RPJMD)
				Rapat evaluasi data Perangkat Daerah Triwulan II
				melakukan pengecekan pengisian data perangkat daerah
				Rapat evaluasi data Perangkat Daerah Triwulan III
				Menyusun Laporan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah data
				Menyampaikan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah data kepada Pimpinan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80	Mengusulkan surat keputusan wali kota tentang Tim Forum Satu Data Kota Samarinda
				Memeriksa dan menyetujui draft tim surat keputusan wali kota tentang Tim Forum Satu Data Kota Samarinda
				Mengesahkan Draft SK Tim surat keputusan wali kota tentang Tim Forum Satu Data Kota Samarinda
				Menyusun Instrumen Pengumpulan Data Spasial
				Rapat Evaluasi data spasial tahun lalu dan rencana kerja tahun ini
				Rapat Sosialisasi teknis geospasial kepada Perangkat Daerah tahap 1
				Rapat Persiapan Bhumandala Award

				Mengumpulkan data spasial dari SKPD dan anggota tim Informasi Pembangunan
				Mengolah Data spasial dari SKPD
				Rapat Sosialisasi teknis geospasial kepada Perangkat Daerah tahap 2
				Mengumpulkan data spasial dari SKPD dan anggota tim Informasi Pembangunan
				Mengolah Data spasial dari SKPD
				Rapat Sosialisasi teknis geospasial kepada Perangkat Daerah tahap 3
				Menyusun Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kota Samarinda
				Menyampaikan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah kepada Pimpinan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	6	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	Pembentukan tim Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kot
				Pengumpulan Realisasi Renja-PD Per-Triwulan
				Evaluasi Renja-PD Per Triwulan
				Rapat Koordinasi Evaluasi Renja-PD Tahun 2024
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPKD Triwulan I

				Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPKD Triwulan II
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPKD Triwulan III
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPKD Triwulan IV
				Rakor Dalev Se Kaltim
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerjasa	14	Pembentukan tim Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Pengumpulan data Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Mengolah data Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Rapat tim Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Penyusunan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Triwulan I
				Mengolah data Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Rapat tim Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Penyusunan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Triwulan II
				Mengolah data Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Rapat tim Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Penyusunan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Triwulan III
				Mengolah data Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Rapat tim Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Penyusunan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Triwulan IV
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	Penyusunan Dokumen TW 4 Tahun 2023
				Pembentukan tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Pengumpulan data APBD Kota Samarinda Tahun 2024
				Mengolah data APBD Kota Samarinda Tahun 2024
				Rapat Koordinasi Monitoring,

				Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Monitoring dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan I
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan I
				Penyusunan Dokumen TW I Tahun 2024
				Monitoring dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II
				Penyusunan Dokumen TW II Tahun 2024
				Monitoring dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan III
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan III
				Penyusunan Dokumen TW III Tahun 2024
				Monitoring dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan IV
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan IV
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	%	88	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	16	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	Rapat-rapat koordinasi
				Rapat koordinasi perubahan Renstra
				Rapat koordinasi perubahan renja

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Pembuatan laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	20	Rapat-rapat koordinasi
				evaluasi TW I
				evaluasi TW II
				evaluasi TW III
				evaluasi TW IV
				Pembuatan laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	Rapat-rapat koordinasi
				evaluasi TW I
				evaluasi TW II
				evaluasi TW III
				evaluasi TW IV
				Pembuatan laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	Rapat-rapat koordinasi
				Rapat koordinasi Renstra
				Rapat koordinasi renja
				Pembuatan laporan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Dokumen	1	Pelaksanaan koordinasi dan menerima Konsultasi dari OPD , pelaksanaan Rapat Intern Subbid PSDM dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai tupoksi , serta Koordinasi melalui Rapat Awal pelaksanaan kegiatan Tim

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			Koordinasi guna menganalisa Data terpilah dari OPD terkait untuk dimasukkan dalam dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia, Membuatn SK Kegiatan
				Membuat SPD , membuat SPJ untuk pelaksanaan triwulan 1, pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD dibawah koordinasi subkor Pembangunan Manusia, pelaksanaan rapat kegiatan dengan tim yang terlibat
				Pelaksanaan Koordinasi Rapat Intern dan pelaksanaan konsultasi dengan OPD mengenai Usulan Perubahan 2022 , melaksanakan belanja Penggandaan
				Pelaksanaan dan penyelesaian pembuatan dokumen , realisasi belanja cetak Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	Rapat-rapat koordinasi
				Membuat laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	Laporan	9	Rapat-rapat koordinasi
				evaluasi TW I
				evaluasi TW II
				evaluasi TW III
				evaluasi TW IV

Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia			Membuat laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	Rapat-rapat koordinasi
				Rapat koordinasi perubahan Renstra
				Rapat koordinasi perubahan renja
				Membuat laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	8	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Rapat internal pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
				Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
				Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	Verifikasi RKPD 2025
				Asistensi Pergeseran 2024
				Asistensi Perubahan 2024

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	Rapat Monitoring dan Evaluasi OPD
				Pengumpulan data dan informasi, analisa data dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan koordinasi dengan OPD
				Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi realisasi Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	Rapat internal PSIW pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
				Rapat Persiapan kegiatan Pelelangan pembuatan Dokumen Bidang Perekonomian
				Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi/K/L
				Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Dokumen	1	Rapat internal pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA
				Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
				Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	Verifikasi RKPJMD 2025
				Asistensi Pergeseran 2024
				Asistensi Perubahan 2024

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	Rapat Monitoring dan Evaluasi OPD
				Pengumpulan data dan informasi, analisa data dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan koordinasi dengan OPD
				Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi realisasi Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	Rapat Koordinasi Pokja Aksi Perubahan Iklim
				Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi/K/L
				Penyusunan Dokumen RAD Perubahan Iklim
				Rapat Teknis Sektor Pertanian dan Perikanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	16	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Rapat Koordinasi Penyusunan Ranwal, Rancangan, Rankir Renja 2025
				Rapat Koordinasi Penyusunan KUA PPAS
				Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi/K/L
				Rapat Internal Bidang PSIW
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	Rapat Asistensi RKA Bidang Infrastruktur
				Asistensi RKA Bidang Infrastruktur
				Inventarisasi dan analisa data RKA yang diinput di SIPD
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	Rapat Monev OPD Infrastruktur
				Pengumpulan data dan informasi, analisa data dokumen perencanaan bidang Infrastruktur
				Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi realisasi Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	Rapat Koordinasi Pokja PKP
				Pembentukan Forum PKP
				Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi/K/L
				Penyusunan Laporan Pokja PKP

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi dan mengarahkan kualitas belanja daerah. Perencanaan yang akurat, berbasis data, ditopang oleh pengetahuan, dan dinamika pembangunan yang mutakhir menjadi awal untuk menjamin bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar dibelanjakan untuk menjawab permasalahan pembangunan



dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program ini memiliki sasaran untuk memastikan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari proses perencanaan perlu dipastikan didukung dengan anggaran yang memadai.

Terdapat tiga kegiatan yang menjadi turunan operasional dari program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut yakni (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Keempatnya yakni (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), (3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut bersifat saling berhubungan dari hulu hingga hilir. Proses perencanaan hingga penetapan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai stakeholder (partisipatif) dilaksanakan melalui kegiatan pertama. Selanjutnya, untuk menyusun substansi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dilakukan pengumpulan data serta analisis yang berbasis ilmu pengetahuan, data dan fakta, yang dilaksanakan melalui kegiatan kedua. Untuk memastikan hasil perencanaan diimplementasikan dan memperoleh target yang diharapkan serta tepat sasaran, dilaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pengendalian daerah melalui kegiatan ketiga sedangkan untuk Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Tabel 3.9 menunjukkan hal mendetail terkait sub kegiatan beserta rencana aksi yang disusun untuk menjadi arahan kinerja tahun 2024.

## II. Sasaran : Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik

Sasaran strategis kedua dari kinerja Bapperida Kota Samarinda berkaitan dengan meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik.

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.10 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	64	57,12	Nilai	89,25

Kinerja strategis 2 Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 mencapai 89,25%. Walaupun masuk dalam kategori "Tinggi" masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan. Pembahasan/analisis secara komprehensif mengenai realisasi dan capaian

kinerja strategis 2 akan dilakukan bersamaan setelah proses analisis terhadap capaian tahun sebelumnya serta analisis lainnya dilakukan.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	55	45,44	61	59,20	64	57,12

Pencapaian kinerja strategis kedua perlu ditingkatkan karena belum menunjuk kinerja yang optimal sebab target-target belum tercapai 100% walaupun nilainya Katagori Inovatif.

## 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bapperida 2021 – 2026)

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	64	57,12	Capaian sebesar 89,25 %

Pada tahun 2024 perencanaan jangka menengah 2021–2026, sasaran strategis kedua memiliki capaian sebesar 89,25% walaupun belum mencapai target 100% namun dapat dikategorikan sebagai pencapaian "Sangat Tinggi.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan**

**a. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja**

1. Tingkat kematangan inovasi (kualitas inovasi) yang dihimpun oleh Bapperida. Nilai untuk tiap inovasi masih bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat nilai inovasi dengan rerata bawah, menengah dan tinggi. Bahkan, ada beberapa inovasi yang tidak melakukan input dokumen yang menyebabkan inovasi terkait tidak dapat dinilai.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bapperida Kota Samarinda di bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) dalam hal melakukan tahapan pendampingan pada inovator masih perlu ditingkatkan. Pendampingan secara intens merupakan sesuatu yang krusial, karena dapat mengoreksi kualitas inovasi yang dihimpun. Pendampingan dapat memberikan motivasi bagi inovator, bahkan dapat membantu memberikan solusi bagi inovator yang menemui kendala dalam melengkapi dokumen inovasi yang dimiliki.
3. Pemanfaatan Aplikasi yang dimiliki oleh Bapperida Kota Samarinda (Jarsiplus) secara lebih maksimal. Peningkatan kualitas aplikasi masih harus dilakukan dengan menambahkan beberapa menu di dalamnya demi kelancaran dan kemudahan yang lebih baik lagi bagi semua orang yang memanfaatkan aplikasi Jarsiplus.

- 
- b. Solusi yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang telah dilakukan)
1. Melakukan kegiatan yang bersifat forum dan sosialisasi untuk pengisian Indeks Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi BAIMBAI 2024. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang luas kepada semua inovator tentang tata cara penilaian Indeks Inovasi Daerah serta penilaian Lomba Inovasi BAIMBAI 2024.
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja
1. Melakukan kegiatan sosialisasi secara terpisah untuk masing-masing pengisian Indeks Inovasi Daerah dan Lomba BAIMBAI 2025. Tindakan ini dilakukan agar kedua hal tersebut dapat dipahami sebagai dua (2) urusan yang berbeda dari sudut pandang inovator se-Kota Samarinda sehingga meminimalisir karancuan persepsi yang dapat terjadi.
  2. Melakukan kegiatan pendampingan kepada para inovator. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas secara kelompok (grup) yang berisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Rida. Setiap kelompok akan mengampu beberapa inovator (OPD) yang nantinya para inovator secara intens dan berkelanjutan melakukan komunikasi dan melaporkan inovasinya kepada koordinator kelompok tersebut.
  3. Melakukan revisi pada aplikasi Jarsiplus. Revisi ini dilakukan sekaligus untuk mengatasi beberapa menu dalam aplikasi yang dirasa kurang sesuai dengan kecepatan dan ketepatan penggunaan aplikasi Jarsiplus. Adapun setelah melakukan revisi pada aplikasi, perlu dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh individu di Bidang

Rida. Bimtek ini sekaligus sebagai penyegaran berulang dan pemantapan ilmu bagi setiap individu di kemudian hari.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
a Meningkatkan kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	96,24	86,08	13,92

Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis kedua. Kinerja anggaran adalah sebesar 96,24% dengan capaian kinerja 86,08%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, upaya untuk mencapai kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 13,92%.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Samarinda. Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.657.888.700,- Tabel 3.14 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dilengkapi dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua.

Tabel 3.14 Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 2 (2024)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	AKSI
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	%	74	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	5	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	Penyempurnaan TOR
				Review bahan kajian
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Penyusunan Draft Laporan Awal
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekpose Hasil Kajian
Finalisasi Laporan Hasil Kajian				
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Laporan	1	Penyempurnaan TOR
				Review bahan kajian
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Penyusunan Draft Laporan Awal

	Pemerintahan Umum			Penyusunan Draft Laporan Akhir Ekpose Hasil Kajian Finalisasi Laporan Hasil Kajian
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	Penyempurnaan TOR Review bahan kajian Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian Pengumpulan Data Lapangan Penyusunan Draft Laporan Awal Penyusunan Draft Laporan Akhir Ekpose Hasil Kajian Finalisasi Laporan Hasil Kajian Penyempurnaan TOR
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	Rapat Persiapan Pembuatan SK Tim Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Rapat Koordinasi Analisis Data Penginputan Data Ke Dalam Aplikasi Pembuatan Laporan Evaluasi
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Laporan	1	Rapat Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Rancangan Penelitian dan Instrumen Penelitian Pengumpulan Data & Assesment Validasi Data & FGD Expose Hasil Kajian / Diseminasi Finalisasi Laporan Hasil Kajian Monitoring dan Evaluasi

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	6	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	Koordinasi FGD Penyusunan ICP Presentasi ICP Pengayaan materi pasca presentasi ICP Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian Pengumpulan Data Lapangan Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi Penyusunan Draft Laporan Awal Penyusunan Draft Laporan Akhir Ekpose Hasil Kajian Finalisasi Laporan Hasil Kajian Cetak Buku Hasil Kajian Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	Koordinasi FGD Penyusunan ICP Presentasi ICP Pengayaan materi pasca presentasi ICP Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian Pengumpulan Data Lapangan Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi Penyusunan Draft Laporan Awal Penyusunan Draft Laporan Akhir Ekpose Hasil Kajian Finalisasi Laporan Hasil Kajian

				Cetak Buku Hasil Kajian
				Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	Koordinasi
				FGD
				Penyusunan ICP
				Presentasi ICP
				Pengayaan materi pasca presentasi ICP
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi
				Penyusunan Draft Laporan Awal
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekpose Hasil Kajian
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Cetak Buku Hasil Kajian
Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait				
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	Koordinasi
				FGD
				Penyusunan ICP
				Presentasi ICP
				Pengayaan materi pasca presentasi ICP
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi
				Penyusunan Draft Laporan Awal
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekpose Hasil Kajian
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Cetak Buku Hasil Kajian
Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait				

Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	Koordinasi
				FGD
				Penyusunan ICP
				Presentasi ICP
				Pengayaan materi pasca presentasi ICP
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi
				Penyusunan Draft Laporan Awal
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekpose Hasil Kajian
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Cetak Buku Hasil Kajian
Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait				
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	Koordinasi
				FGD
				Penyusunan ICP
				Presentasi ICP
				Pengayaan materi pasca presentasi ICP
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Penelitian
				Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data Lapangan
				Analisa Hasil Penelitian lapangan: Primer dan Sekunder, interpretasi teori analisa dan interpretasi regulasi
				Penyusunan Draft Laporan Awal
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekpose Hasil Kajian
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Cetak Buku Hasil Kajian
Membagikan Buku Hasil Kajian Kepada OPD Terkait				

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	7	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	Penyempurnaan TOR dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design), dan Instrumen Survey Pengumpulan Data Lapangan Pengolahan Analisis Data Penyusunan Draft laporan Akhir Expose Final Report / Seminar Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	Penyempurnaan ToR , Rapat Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design) dan Instrumen Penelitian Pengumpulan Data, Desk Analysis, Pengukuran & Assesment Validasi Data, Best Practise Sharing/FGD Ekspose hasil Kajian / diseminasi Finalisasi Laporan Hasil Kajian Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	Penyempurnaan TOR dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design), dan Instrumen Survey Pengumpulan Data Lapangan Pengolahan Analisis Data Penyusunan Draft laporan Akhir Expose Final Report / Seminar Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	Penyempurnaan ToR , Rapat Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design) dan Instrumen Penelitian Pengumpulan Data, Desk Analysis, Pengukuran & Assesment Validasi Data, Best Practise Sharing/FGD Ekspose hasil Kajian / diseminasi

				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	Penyempurnaan TOR dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
				Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design), dan Instrumen Survey
				Pengumpulan Data Lapangan
				Pengolahan Analisis Data
				Penyusunan Draft laporan Akhir
				Expose Final Report / Seminar
				Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	Penyempurnaan ToR , Rapat Koordinasi dan Persiapan
				Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design) dan Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data, Desk Analysis, Pengukuran & Assesment
				Validasi Data, Best Practise Sharing/FGD
				Ekspose hasil Kajian / diseminasi
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	Penyempurnaan ToR , Rapat Koordinasi dan Persiapan
				Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design) dan Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data, Desk Analysis, Pengukuran & Assesment
				Validasi Data, Best Practise Sharing/FGD
				Ekspose hasil Kajian / diseminasi
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Monitoring & Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	Penyempurnaan ToR , Rapat Koordinasi dan Persiapan
				Penyusunan Rancangan Penelitian (Research design) dan Instrumen Penelitian
				Pengumpulan Data, Desk Analysis, Pengukuran & Assesment
				Validasi Data, Best Practise Sharing/FGD
				Ekspose hasil Kajian / diseminasi
				Finalisasi Laporan Hasil Kajian
				Monitoring & Evaluasi

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	4	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	Persiapan Penyusunan ToR & Review bahan kajian
				Penyusunan Rancangan Penelitian (research design) dan Instrumen Survey
				Pengumpulan Data Lapangan
				Pengolahan & Analisis Data
				FGD
				Penyusunan Draft Laporan Akhir
				Ekposes Final Report / Seminar Monitoring & Evaluasi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	Menghubungi dan berkoordinasi kepada para Pakar terkait kesediaan sebagai Pelaku Kelitbangan Kota Samarinda
				Menyusun Rencana Kerja dan pembagian tugas tanggung jawab Tim Pelaku Kelitbangan
				Pembuatan SK Pelaku Kelitbangan
				Fasilitasi & Penyerahan SK Tim Pelaku Kelitbangan
				Rakor Kelitbangan Se-Kota Samarinda
				Desk <i>Idea Concept Paper</i> (ICP) Tim Kelitbangan Unsur Pelaksana dengan OPD (Inventarisasi Isu-isu actual & permasalahan dari para pemangku kepentingan dan penjangkaran program) .
				Penyampaian Hasil Desk <i>Idea Concept Paper</i> (ICP) ke TPM oleh Penyusun Rencana Program Kerja Kelitbangan dan Tim Pelaksana untuk ditindak lanjuti

				<p>Rapat Tim TPM Reviu <i>ICP</i> Tim Kelitbangan Unsur Pelaksana terhadap Usulan Topik, target harapan dan indikatornya dari OPD sesuai standar mutu ilmiah (metodologi &amp; substansial)</p> <p>SIDANG TPM penyampaian hasil reviu <i>ICP</i> untuk prioritas kebijakan kedalam topik kelitbangan dan penandatanganan Lembar Persetujuan <i>ICP</i></p> <p>Penyampaian <i>ToR</i> Hasil Rumusan Tim Pelaksana ke TPM</p> <p>SIDANG TPM penyampaian hasil reviu <i>ToR</i> sesuai standar mutu ilmiah, (metodologi &amp; substansial) dan penandatanganan Lembar Persetujuan <i>ToR</i></p> <p>Rapat TPM dgn Tim Pelaksana untuk penyampaian Hasil Reviu (<i>RD/IS</i>)</p> <p>SIDANG TPM penyampaian hasil reviu <i>RD/IS</i> untuk prioritas kebijakan kedalam topik kelitbangan dan penandatanganan Lembar Persetujuan <i>RD/IS</i></p> <p>Penyampaian <i>ToR &amp; RD/IS</i> oleh TPM ke MP untuk mendapatkan Pertimbangan, persetujuan utk ditetapkan sebagai program kerja kelitbangan</p> <p>Sidang Majelis Pertimbangan (MP)</p> <p>Penyusunan RKT , RIK dan RENCANA AKSI</p> <p>Monitoring &amp; Evaluasi</p>
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	<p>Penyempurnaan TOR /KAK</p> <p>Koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait untuk Pelaksanaan Kegiatan ( Kolaborasi Stakeholder )</p> <p>Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim</p> <p>Bimtek Jarsiplus, Sosialisasi Lomba "BAIMBAI" dan Festival Inovasi</p> <p>Penjaringan Proposal Inovasi (Peserta Inovasi)</p>

				Penilaian Proposal dan Wawancara / Presentasi Inovasi
				Promosi Inovasi melalui Festival Inovasi sekaligus Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi "BAIMBAI"
				Finalisasi Laporan akhir Kegiatan
				Rapat Kegiatan
				Sosialisasi Jurnal ke Stakeholder
				Pengumpulan Makalah
				FGD Peer Review
				Proses Editing
				Penerbitan dan publikasi Jurnal
				Distribusi Jurnal

### **Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida**

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

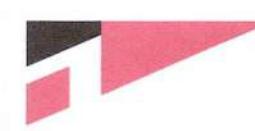
Sebelumnya Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam peraturan Kep Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, website, dan media sosial baik dalam bentuk skoring/angka absolut, atau dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun Instrumen Survei.
- b) Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel.
- c) Menentukan responden.
- d) Melakukan survei.
- e) Mengolah hasil survei.
- f) Menyajikan dan melaporkan hasil survei.



diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, website, dan media sosial baik dalam bentuk skoring/angka absolut, atau dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun Instrumen Survei.
- b) Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel.
- c) Menentukan responden.
- d) Melakukan survei.
- e) Mengolah hasil survei.
- f) Menyajikan dan melaporkan hasil survei.

Dalam tahapan penentuan teknik survei dapat disesuaikan dengan karakteristik penyelenggara pelayanan. Hal inilah yang membedakan dengan pedoman sebelumnya (IKM) mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda. Dalam Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, penyelenggara boleh menentukan teknik atau metode survei pada survei

kepuasan masyarakat ini. Tabel 3.15 Hasil nilai survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Tabel 3.15 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pelayanan Bapperida	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ OPD)	86	89,78	Nilai	104,39

Kinerja strategis 3 Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 mencapai 104,39%. Walaupun masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Bapperida Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Meskipun capaian masuk kategori sangat tinggi, dibutuhkan strategi agar perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan dapat terus dilakukan.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.16. Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ OPD)	82	84,58	85	82,70	86	89,78
---	---------------------------------------	----	-------	----	-------	----	-------

Pencapaian kinerja strategis ketiga telah berjalan optimal pada periode perencanaan jangka menengah 2021–2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat dipertahankan bahkan secara perlahan ditingkatkan.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bapperida 2021 – 2026)

Tabel 3.17 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Strategis 3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ OPD)	Nilai	86	89,78	Melampaui target yang ditetapkan

Tahun 2024 dalam pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah 2021 – 2026. Pada sasaran strategis ketiga ditargetkan mencapai nilai 86. Realisasi kinerja pada tahun ini telah melampaui target, yakni dengan nilai 89,78.

### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

d. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

- 1) Belanja tepat sasaran, baik pelayanan terhadap kebutuhan kerja (sarana prasarana kerja) personel Bapperida Samarinda maupun upaya peningkatan layanan untuk pihak eksternal. Peningkatan layanan untuk pengguna layanan eksternal meliputi publikasi dan penyediaan informasi serta data perencanaan pembangunan yang termutakhir dan mudah terakses. Hal ini termasuk penggunaan teknologi dan informasi dalam penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder pembangunan serta masyarakat luas.
- 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bapperida Samainda baik dalam konteks peningkatan kompetensi maupun penguatan kerjasama internal di antara seluruh personel Bapperida Samarinda. Langkah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki reputasi baik untuk kompetensi perencanaan maupun peningkatan keterampilan lainnya. Untuk meningkatkan kepercayaan kerja bersama di antara personel Bapperida Samarinda, dilaksanakan program *capacity building*. Selain itu, dilakukan proses assessment kepada seluruh pegawai non Aparatur Sipil Negara untuk menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kekuatan personel, yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penempatan personel pada bidang-bidang dan sekretariat Bapperida Samarinda
- 3) Proses pertimbangan dalam menentukan jumlah serta karakter responden dalam proses pengisian Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM). Salah satu bahan evaluasi tahun 2024 adalah terkait proses pengisian SKM Bapperida Samarinda. Terjadi peningkatan jumlah responden jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- 4) Kondisi yang baik namun perlu lebih diperdalam terkait karakter responden yang memberi pandangannya terhadap layanan Bapperida Samarinda. Akan diupayakan pertimbangan lebih lanjut mengenai proporsi masyarakat yang memperoleh layanan secara langsung maupun yang tidak secara langsung memperoleh layanan Bapperida Samarinda.

e. Solusi yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang telah dilakukan)

- 1) Memperluas kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan pengguna layanan Bapperida Samarinda Seperti pada acara Konsultasi Publik, Musrenbang, serta tamu kedinasan dan sebagainya.
- 2) Memperluas jangkauan penyebarluasan informasi terkait layanan dan kinerja Bapperida Samarinda termasuk capaian-capaian pembangunan daerah. Selain melalui website institusi, penyebarluasan informasi layanan Bapperida juga dilakukan melalui sosial media serta keikutsertaan dalam berbagai acara pembangunan daerah
- 3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bapperida Samarinda. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi personel Bapperida yang memberikan pelayanan terhadap produk/output hingga outcome dan sasaran organisasi.

c. Solusi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja

- 1) Melanjutkan dan meningkatkan program peningkatan kapasitas SDM Bapperida Samarinda, yakni dengan melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang menunjang kinerja dan dapat meningkatkan layanan Bapperida Samarinda. Peningkatan ini dilakukan baik pada aspek kualitas maupun kuantitas.
- 2) Melakukan pertimbangan lebih lanjut dan strategis dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat agar jumlah responden yang mengikuti survey tergolong representatif dan tepat sasaran, atau proporsional berdasarkan kategori pengguna langsung maupun tidak langsung
- 3) Melaksanakan pengendalian dengan lebih konsisten untuk memastikan kinerja organisasi sesuai dengan timeline kerja dan hasil kerja tepat mutu serta tepat sasaran.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.18 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (strategis 3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ OPD)	104,39	97,36	2,64

Tabel 3.18 Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis ketiga. Kinerja anggaran adalah sebesar 97,36% dengan capaian kinerja 104,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, untuk mengupayakan layanan organisasi baik internal maupun eksternal, terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,64%.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait pelayanan organisasi baik secara internal maupun eksternal utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada Sekretariat Bapperida Kota Samarinda melalui "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota". Pelaksanaan program ini memperoleh alokasi sebesar Rp.19.444.327.804. Tabel 3.19 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dilengkapi dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga.

Tabel 3.19 Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 3

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	AKSI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	81,50	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	6	Rapat Koordinasi dalam penyusunan Ranwal, Rancangan dan Rankir tahun 2024
				Rapat Koordinasi utk penyusunan RKT tahun 2024
				Rapat Koordinasi dalam penyusunan Ranwal, Rancangan dan Rankir tahun 2024
				Rapat Koordinasi utk penyusunan RKT tahun 2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	Penyusunan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024
				Penyusunan RKA thn 2024
				Penyusunan RKA Perubahan thn 2024
				Penyusunan Rencana Aksi tahun 2024
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Penyiapan Dokumen Sakip tahun 2023 sebagai bahan Evaluasi AKIP
				Membuat Evaluasi Renja tahun 2023
				Koordinasi Laporan Triwulanan 2024
				Evaluasi Pengukuran Kinerja thn 2023
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	3	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	74	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Gaji ASN
				Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Rapel Gaji ASN
				Membuat Rekap Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN
				Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Tunjangan (TPP) ASN
				Membuat Daftar Penerima dan Melakukan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Gaji Non ASN
				Membuat Daftar Penerima dan Melakukan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan
				Merekap Realisasi Barang Jasa dan Modal
				Merekap NTPN
				Merekap Pemungutan Pajak Resto dan Infaq
				Merekap Transaksi Perjalanan Dinas
				Membuat Neraca, LRA, CALK
				Unifikasi PPN dan Pph Belanja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Pegawai	90	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Mendata Pegawai yang akan mengikuti pelatihan
				Mengirim Pegawai yang akan mengikuti pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	Mendata Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan teknis
				Mengirim Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	5	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	Paket	10	Menyediakan Komponen Instalasi listrik

Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	Menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Menyediakan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	Menerima Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokumen	1500	Mengatur Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	51	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	204	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	Membuat Daftar dan Melakukan Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	------	---	--

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Perubahan Belanja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dalam tabel 3.20 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Belanja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI		SILPA	KETERANGAN
			ANGGARAN (RP)	%		
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19,444,327,804</b>	<b>18,930,376,995</b>	<b>97.36</b>	<b>507.950.809</b>	
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	250,000,000	<b>246,401,571</b>	<b>98.56</b>	<b>3.598.429</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125,000,000	124,945,000	99.96	55.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000	72,796,571	97.06	2.203.429	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	48,660,000	97.32	1.340.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13,317,681,721</b>	<b>13,070,699,559</b>	<b>98.15</b>	<b>246.982.162</b>	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,013,506,000	12,013,506,000	97.96	245.586.010	Fisik Sudah Tercapai, untuk pembayaran TTP tidak semua pegawai menerima 100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,254,175,721	1,254,175,721	99.92	1.012.152	Fisik Sudah Tercapai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	99.2	384.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>280,000,000</b>	274,000,000	97.86	<b>6.000.000</b>	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	280,000,000	274,000,000	97.86	6.000.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,215,209,500</b>	<b>2,125,306,171</b>	<b>95.94</b>	<b>89.903.329</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	39,946,000	99.87	54.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718,950,000	700,470,000	97.43	18.480.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	99,936,000	99.94	64.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119,994,500	116,514,500	97.10	3.480.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	12.000.000	100	0	Sudah Tercapai Kegiatannya
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,119,265,000	1.051.439.671	93,94	67.825.329	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105,000,000	105.000.000	100	0	Sudah Tercapai Kegiatannya
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	724,722,260	<b>681.695.000</b>	<b>94,06</b>	<b>43.027.260</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	85,000,000	83.000.000	97,65	2.000.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai

2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,000,000	104.410.000	87,01	15.590.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Pengadaan Mebel	519,722,260	494.285.000	95,11	25.437.260	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,304,548,728</b>	<b>1.227.759.101</b>	<b>94,11</b>	<b>76.789.627</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436,978,728	430.039.101	98,41	6.939.627	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867,570,000	797.720.000	91,95	69.850.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,352,165,595</b>	<b>1.304.515.593</b>	<b>96,48</b>	<b>47.650.002</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	513,770,000	491.624.218	95,69	22.145.782	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,639,595	70.355.800	83,12	14.283.795	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118,920,000	118.901.000	99,98	19.000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564,000,000	553.842.465	98,20	10.157.535	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,836,000	69.792.110	98,53	1.043.890	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>12,739,202,500</b>	<b>11.557.285.814</b>	<b>90,72</b>	<b>1.181.916.686</b>	
<b>A</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>5,216,812,000</b>	<b>4.419.775.760</b>	<b>84,72</b>	<b>797.036.240</b>	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	960,314,875	901.622.311	93,89	58.692.564	<b>Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada</b>

						sisa anggaran dari honorarium tim (sesuai PERPRES No. 53 Tahun 2023) Pembatasan pemberian honor ke pada anggota tim
2	Koordinasi Penalaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1,216,029,150	988.804.591	81,31	227.224.559	<b>Realisasi Pekerjaan Tercapai,</b> masih ada sisa anggaran dari perjalanan dinas untuk narasumber yang semestinya hadir di tempat namun berhalangan hadir, pembatasan jumlah pegawai yang menghadiri rapat diluar kota, Efisiensi dari belanja bahan cetak, belanja makan dan minum dan paket meeting dalam kota
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	149,138,800	138.343.300	92,76	10.795.500	<b>Realisasi Pekerjaan Tercapai,</b> ada sisa pagu belanja bahan ATK karena menyesuaikan dengan harga seminar kit e-katalog
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	269,655,250	167.945.250	62,28	101.710.000	<b>Realisasi Pekerjaan Tercapai,</b> masih ada sisa anggaran dari honorarium narasumber

						dikarenakan padatnya jadwal rapat-rapat internal instansi Pemkot Samarinda dengan waktu yang telah ditentukan
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	489,327,950	468.017.950	95,65	21.310.000	<b>Realisasi Pekerjaan Tercapai</b> , ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan padatnya jadwal rapat dengan pihak Pemprov. Kaltim dengan waktu yang telah ditentukan
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	450,918,450	231.418.450	51,32	219.500.000	Realisasi Pekerjaan Tercapai, masih ada sisa anggaran dari paket meeting dalam kota untuk pelatihan operator dan pengusul di aplikasi SIPD RI (terjadi hambatan adanya pemutakhiran di SIPD RI)
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dukomen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1,681,427,525	1.523.623.908	90,61	157.803.617	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran dari honorarium tim (sesuai PERPRES No. 53 Tahun 2023) Pembatasan pemberian honor ke pada anggota tim, masih ada sisa

						anggaran dari perjalanan dinas untuk narasumber yang semestinya hadir di tempat namun berhalangan hadir, pembatasan jumlah pegawai yang menghadiri rapat diluar kota
<b>B</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,927,732,500</b>	<b>1.731.744.594</b>	<b>89,83</b>	<b>195.987.906</b>	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	978,322,000	879.198.194	89,87	99.123.806	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat disebabkan keterbatasan waktu sehingga untuk efisiensi ada beberapa kegiatan rapat jadwalnya dipadatkan, ada sisa honorarium nara sumber karena padatnya jadwal kegiatan rapat sehingga ada perubahan narasumber dari yang direncanakan
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna SKPD	949,410,500	852.546.400	89,80	96.864.100	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran dari honorarium

						tim karena adanya pembatasan pemberian honor kepada anggota tim sesuai Perpres No. 53 Tahun 2023, ada sisa anggaran dari perjalanan dinas karena adanya pembatasan jumlah pegawai yang menghadiri rapat diluar kota dan keterbatasan waktu
<b>C</b>	<b><i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>	<b>5,594,658,000</b>	<b>5.405.765.460</b>	<b>96,62</b>	<b>188.892.540</b>	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4,612,378,000	4.462.822.960	96,76	149.555.040	Realisasi Pekerjaan Tercapai, tetapi ada sisa anggaran dari Narsum, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Perjadin sebab keterbatasan waktu pelaksanaan
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	80,000,000	78.440.000	98,05	1.560.000	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran dari Honorarium Pengelolaan Keuangan yang lebih dari 5% dari pagu kegiatan
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	902,280,000	864.502.500	95,81	37.777.500	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada

	Pembangunan Daerah					sisa anggaran dari honorarium tim (sesuai PERPRES No. 53 Tahun 2023) Pembatasan pemberian honor ke pada anggota tim
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6,059,666,000</b>	<b>5.179.121.234</b>	<b>85,47</b>	<b>880.544.766</b>	
<b>A</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>2,780,450,000</b>	<b>2.341.018.245</b>	<b>84,20</b>	<b>439.431.755</b>	
1	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	350,000,000	275.400.052	78,69	74.599.948	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi dan padatnya jadwal rapat rapat internal instansi Pemkot Samarinda dengan waktu yang telah ditentukan
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57,500,000	34.151.075	59,39	23.348.925	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi dan padatnya jadwal rapat rapat internal instansi Pemkot Samarinda dengan waktu yang telah ditentukan
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	57,500,000	40.853.100	71,05	16.646.900	Realisasi Pekerjaan

	Dokumen Perencanaan Perangkat Darah Bidang Pemerintahan					Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi dan padatnya jadwal rapat rapat internal instansi Pemkot Samarinda dengan waktu yang telah ditentukan
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	800,000,000	726.990.342	90,87	73.009.658	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi dan padatnya jadwal rapat rapat internal instansi Pemkot Samarinda dengan waktu yang telah ditentukan
5	Koordinasi Penyusunan Dukomen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPD)	700,000,000	565.899.373	80,84	134.100.627	Semua realiasi Pekerjaan tercapai, danya sisa anggaran makan minum di sebabkan padatnya jadwal rapat internal di Bapperida sehingga kami mengadakan efisiensi koordinasi tanpa makan minum rapat dengan pertemuan di ruang Bidang PPM, sedangkan untuk sub

						kegiatan Narasumber ada kelebihan sisa anggaran, diakibatkan beberapa kegiatan yang menghadirkan Narasumber terkendala dengan Jadwal Di Bapperida yang padat
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57,500,000	29.516.000	51,33	27.984.000	Adanya sisa anggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57,500,000	56.539.100	98,33	960.900	Silpa sisa selisih harga, secara keseluruhan semua terlaksana, output tercapai
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	700,450,000	611.669.203	87,33	88.780.797	Silpa Honor Tim Kegiatan terkait Peraturan Presiden No 33 Batas Penerimaan Honor Ess II & Ess III, output tercapai
<b>B</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>2,322,444,000</b>	<b>1.952.510.885</b>	<b>84,07</b>	<b>369.933.115</b>	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75,000,000	58.053.000	77,40	16.947.000	Fisik pekerjaan tercapai, Efisiensi di Belanja Perjudin dan Honor PPKu, serta selisih kontrak di ATK

2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	62,186,000	47.978.200	77,15	14.207.800	Fisik pekerjaan tercapai, ada selisih kontrak di ATK dan Efisiensi di Perjadin serta Belanja Makanan dan Minuman
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	54,186,000	51.218.000	94,52	2.968.000	Fisik pekerjaan tercapai, Efisiensi di Belanja Makanan dan Minuman
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1,052,000,000	778.296.068	73,98	273.703.932	Fisik pekerjaan tercapai, ada Efisiensi di Belanja Narasumber, Tenaga Ahli, Paket Meeting, Makanan dan Minuman, Honor PPKeu serta Perjadin, selisih Kontrak pada Belanja ATK, Cetak, Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Komputer, Konsultan dan Honor Tim
5	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD dan RKPD)	250,000,000	243.643.155	97,46	6.356.845	Fisik pekerjaan tercapai, ada Efisiensi di Belanja Perjadin dan Honor PPKeu
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	58,186,000	58.131.000	99,91	55.000	Fisik pekerjaan tercapai, ada selisih kontrak ATK
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	51,186,000	51.186.000	100,00	-	Fisik pekerjaan tercapai

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	719,700,000	664.005.462	92,26	55.694.538	Fisik pekerjaan tercapai, ada Efisiensi Kontrak pada Belanja ATK, Belanja Cetak, Makanan dan Minuman, Honor Tim, Belanja Modal Audio, Belanja Perjadin serta selisih Belanja Pakaian Batik Tradisional, Honor Narasumber, Belanja Alat Kantor, dan Belanja Modal Komputer
<b>C</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur</b>	<b>956,772,000</b>	<b>885.592.104</b>	<b>92,56</b>	<b>71.179.896</b>	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	150,000,000	139.453.700	92,97	10.546.300	Fisik pekerjaan tercapai, ada selisih standar satuan harga di Perjadin, selisih kontrak di ATK, Belanja Modal, Efisiensi dari Belanja makanan dan minuman, serta Honor PPKom
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64,186,000	46.151.000	71,90	18.035.000	Fisik pekerjaan tercapai, selisih kontrak di ATK, Efisiensi dari Belanja makanan dan minuman
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	100,186,000	95.406.000	95,23	4.780.000	Fisik pekerjaan tercapai, Efisiensi dari

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Belanja makanan dan minuman, serta Honor PPKu
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturn	642,400,000	604.581.404	94,11	37.818.596	Fisik pekerjaan tercapai, Efisiensi Belanja ATK, Cetak, Honor Narasumber, dan Belanja Modal Komputer serta selisih Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjadin, dan Belanja Modal Peralatan Studio
<b>IV</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>2,657,888,700</b>	<b>2.287.967.600</b>	<b>86,08</b>	<b>369.921.100</b>	
<b>A</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>498,919,900</b>	<b>378.931.957</b>	<b>75,95</b>	<b>119.987.943</b>	
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100,000,000	79.048.434	79,05	20.951.566	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin, dan laporan pendahuluan
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	100,438,600	85.042.368	84,67	15.396.232	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin, dan laporan pendahuluan
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,327,300	90.242.415	89,95	10.084.885	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin, dan laporan pendahuluan

4	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	118,890,000	56.803.600	47,78	62.086.400	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada Honorarium Tim
5	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	79,264,000	67.795.140	85,53	11.468.860	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin, dan laporan pendahuluan
<b>B</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>307,090,800</b>	<b>280.498.070</b>	<b>91,34</b>	<b>26.592.730</b>	
1	Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek Sosial	103,830,500	93.045.630	89,61	10.784.870	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100,000,000	91.745.500	91,75	8.254.500	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Penelitaian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	103,260,300	95.706.940	92,69	7.553.360	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
<b>C</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>582,094,000</b>	<b>530.223.677</b>	<b>91,09</b>	<b>51.870.323</b>	
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	115,161,000	103.256.130	89,66	11.904.870	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin
2	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	122,937,000	115.560.340	94,00	7.376.660	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadin, makmin dan laporan pendahuluan
3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	120,114,000	116.306.006	96,83	3.807.994	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada cetak dan fotocopy
4	Penelitian dan Pengembangan	114,532,000	105.403.110	92,03	9.128.890	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada

	Pekerjaan Umum					perjadi, makmin dan laporan pendahuluan
5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	109,350,000	89.698.091	82,03	19.651.909	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadi, makmin dan laporan pendahuluan
<b>D</b>	<b>Pembangunan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>1,269,784,000</b>	<b>1.098.313.896</b>	<b>86,50</b>	<b>171.470.104</b>	
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi Inovasi	189,160,000	169.373.257	89,54	19.786.743	Efisiensi pada beberapa rekening belanja terutama pada Perjalanan dinas pada tiket, serta Honor Tim yang ternyata nama2 tersebut tidak bisa menerima karena telah menjadi tim di kegiatan yg lainnya. -Perjadi 18,8 juta -makmin dan cetak 1 jutaan
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovasi	296,674,000	213.453.900	71,95	83.220.100	Efisiensi pada beberapa rekening belanja terutama Makmin, Narsum, dan Honor Tim yang ternyata nama2 tersebut tidak bisa menerima karena telah menjadi tim di kegiatan yg lainnya.Rincian sbb - Makmin

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1jtn Honor Narsum dan moderator 24jt</li> <li>- Honor Tim Disem Jenis 57 jutaan</li> </ul>
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	783,950,000	715.486.739	91,27	68.463.261	<p>Efisiensi pada beberapa rekening belanja terutama pada Belanja Event Organizer dan Perjalanan dinas pada tiket, serta Honor Tim yang ternyata nama2 tersebut tidak bisa menerima karena telah menjadi tim di kegiatan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Belanja Cetak 1,5jtn</li> <li>-Makmin3,4jtn</li> <li>-Narsum 2,7jt</li> <li>-Honor Tim Pencapaian IID 37,6 juta</li> <li>- Honor Penulis artikel 6,4juta</li> <li>-Belanja EO 20jutaan</li> <li>-Perjadin 2,8 jutaan</li> </ul>
<b>TOTAL</b>		<b>40,901,085,004</b>	<b>37.954.751.643</b>	<b>92,80</b>	<b>2.940.333.361</b>	

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, anggaran DPPA BAPPERIDA Kota Samarinda belanja yang terserap sebesar Rp. 37,954,751,643,- atau 92,80 % dari total belanja 40,091,085,004,-.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang terserap BAPPERIDA Kota Samarinda dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana pada tabel 3.21 berikut ini :

**Tabel 3.21 Perbandingan Pagu dan realisasi Anggaran Bapperida Kota Samarinda Tahun 2022-2024**

TAHUN	2022	2023	2024
PAGU (RP)	31,904,261,684	38,528,671,921	40,091,085,004
REALISASI (Rp)	26,209,910,743	32,365,877,419	37,954,751,643
REALISASI (%)	82,15	84	92,80

Realisasi anggaran BAPPERIDA Kota Samarinda pada tahun 2024 sebesar 92,80 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 yaitu : sebesar 84 %, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 82,15%.

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan pengukuran capaian strategis organisasi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021–2026. Tahun 2024, realisasi kinerja anggaran Bapperida Kota Samarinda mencapai 92,80%. Dari aspek realisasi target program/kegiatan yang mendukung target sasaran strategis, kinerja Bapperida Kota Samarinda mencapai 97,61%. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek-aspek sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja Bappeda tahun 2024 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** (di atas 91%). Uraian capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yakni terkait meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian sebesar 99,20%.
2. Sasaran kedua, yakni terkait meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik menunjukkan capaian sebesar 89,25%
3. Sasaran ketiga, yakni terkait Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida menunjukkan capaian sebesar 104,39 %
4. Dari ketiga sasaran tersebut, rata-rata capaian organisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 97,61%

5. Realisasi anggaran Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebesar 92,80% sehingga secara keseluruhan (perangkat daerah), terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,20%

Selain hal-hal berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah, hasil evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga menjadi poin perhatian pimpinan dalam mengarahkan kinerja organisasi. Pasca diterimanya hasil evaluasi dari Inspektorat Kota Samarinda Tahun 2024, Bapperida Kota Samarinda melakukan upaya perbaikan, yakni dengan melaksanakan pemantauan/pengendalian kinerja dengan lebih konsisten, penuh komitmen, serta yang memenuhi prinsip akuntabel. Salah satunya adalah melaksanakan kendali kinerja personel dalam organisasi yang dipantau tidak hanya tiap tiga bulan (triwulan) namun dilakukan tiap bulan. Mengingat sistem yang dimiliki oleh Bapperida Kota Samarinda pada tahun 2024 belum dapat mengakomodir pemantauan bulanan, maka upaya perbaikan melalui pemantauan bulanan dilakukan secara manual. Penggunaan mekanisme ini memudahkan pimpinan untuk mengetahui bidang-bidang yang telah melakukan pemantauan kinerja bulanan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja. Upaya perbaikan yang dilakukan ini perlahan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja organisasi ditinjau dari penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang telah diagendakan serta rata-rata capaian kinerja. Pada tahun 2024, rata-rata capaian kinerja Bapperida Kota Samarinda adalah sebesar 97,61% dengan realisasi anggaran sebesar 92,80%. Setelah dilakukan perbaikan melalui penerapan hasil evaluasi, utamanya evaluasi terkait akuntabilitas, kinerja Bapperida Kota Samarinda meningkat. Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, tahun 2023 rata-

rata capaian kinerja Bapperida Kota Samarinda mencapai 97,21 % dengan realisasi anggaran sebesar 84 %. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian sebesar 0,61% dan peningkatan realisasi anggaran sebesar 8,80%.

## **B. Upaya Perbaikan Kedepan**

1. Menjadikan hasil evaluasi sebagai salah satu aspek penting dalam perbaikan kinerja, terutama kinerja strategis organisasi.
2. Memperkuat pemantauan kendali pelaksanaan program/kegiatan agar memiliki progres yang baik, tepat sasaran, menjalankan prinsip yang akuntabel serta prinsip pemerintahan yang baik (good governance) lainnya
3. Mengimplemetasikan pemantauan perjanjian kinerja hingga level staf dengan durasi atau periode waktu bulanan dengan memanfaatkan teknologi agar dapat lebih efisien serta konsisten
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja terutama agar kinerja strategis organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana strategis dapat mencapai target yang ditetapkan
5. Memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapperida Kota Samarinda untuk mendukung kinerja organisasi



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

Jl. Dahlia No. 81 Kota Samarinda - Kalimantan TIMUR  
Telp (0541) 203785 - Fax (0541) 732072  
[www.bappeda.samarindakota.go.id](http://www.bappeda.samarindakota.go.id)